

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA BABAKAN KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS

Ririn Viani¹, Chamid Sutikno², Ariesta Amanda³, Indah Ayu Permana Pribadi⁴,
Zaula Rizqi Atika⁵

ririniani689@gmail.com¹, c.sutikno@unupurwokerto.ac.id², ariestaamanda92@gmail.com³,
iap.pribadi@gmail.unupurwokerto.ac.id⁴, zr.atika@gmail.com.ac.id⁵

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang memiliki 4 variabel utama yaitu; komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan komunikasi yang terjalin efektif, ketersediaan sumber daya memadai, disposisi pelaksana yang mendukung, dan struktur birokrasi sesuai tugas porsinya. Sedangkan aspek sumber daya terutama Sumber Daya Manusia (SDM) masih migran, yaitu bidan tidak menetap 24 jam di desa, sehingga pelayanan kurang optimal. Selain itu, sasaran yang tidak mengakui anaknya stunting, meski ekonomi tergolong mampu, dinyatakan karena faktor pola asuh dan kebiasaan yang kurang tepat.

Kata Kunci: Desa Babakan, Implementasi Kebijakan Publik, Penanggulangan Stunting.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of stunting reduction policies in Babakan Village, Karanglewas District, Banyumas Regency. The method used was descriptive qualitative, and informants were selected using purposive sampling. Data sources in this study consisted of primary and secondary data obtained through interviews, observation, and documentation. The focus of this study is based on Edward III's theory of policy implementation, which has four main variables: communication; resources; disposition; and bureaucratic structure. The results of this study indicate that the implementation of stunting reduction policies in Babakan Village has been going well. This is evidenced by effective communication, the availability of adequate resources, the disposition of implementers, and a bureaucratic structure appropriate to their respective duties. However, resources, especially human resources (HR), remain migrant; midwives do not reside 24 hours a day in the village, resulting in suboptimal service. Furthermore, the target population, despite being economically well-off, does not recognize their children as stunted, citing inappropriate parenting patterns and habits.

Keywords: Babakan Village, Public Policy Implementation, Stunting Reduction.

PENDAHULUAN

Implementasi diartikan sebagai proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi proses dari keberlanjutan perumusan masalah, mulai dari masalah dirumuskan, diidentifikasi, sampai dilaksanaka. Sehingga implementasi kebijakan publik merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Menurut Situmorang Chazi, 2016 (dalam permatasari,

2020) Pada dasarnya implementasi kebijakan menjadi variabel krusial dengan pengaruh besar dalam penyelesaian setiap masalah publik. Salah satu permasalahan serius yang menjadi fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah stunting. Sebagaimana disebutkan dalam WHO, bahwa stunting merupakan dampak dari kekurangan gizi kronis pada balita sehingga menjadi lebih pendek dari usiannya, hal ini terjadi dari awal pembentukan janin sampai terlihat pada anak yang berusia dua tahun (Febrian & Yusran, 2021). Stunting tidak hanya pendek, namun dapat memberikan informasi bahwa adanya gangguan pertumbuhan linear dalam jangka waktu lama dengan hitungan tahun (Patimah, 2021).

Secara luas masalah stunting dapat menjadi indikator untuk mengukur status gizi masyarakat, apabila prevalensi balita stunting disuatu wilayah tinggi, maka dapat dipastikan bahwa wilayah tersebut mengalami masalah pembangunan berkelanjutan secara umum. Karena stunting berkaitan dengan gagal tumbuh kembang pada anak, dimana masalah ini dapat mempengaruhi masa depan anak bangsa dengan cara yang signifikan, yaitu dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, diantaranya perkembangan otak yang melambat, keterbelakangan mental, dan kurangnya kemampuan akan sulit belajar, dan juga dikhawatirkan akan munculnya penyakit-penyakit kronis (Syarli & Gusman, 2022). Artinya jika tidak segera diatasi maka berpotensi menyebabkan permasalahan yang membahayakan untuk keberlanjutan pertumbuhan anak bangsa. Pada akhirnya secara umum stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan (Nursyifa & Halim, 2025).

Dalam hal ini, regulasi atau kebijakan yang mengatur penanggulangan penurunan stunting di Indonesia, seperti pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Upaya mewujudkan target tersebut, pemerintah memiliki peran sebagai pengarah, regulator, dan pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa stunting merupakan masalah yang signifikan di Indonesia dan perlu segera ditangani saat ini (Bappenas, 2021). Selain itu adanya implementasi kebijakan dan anggaran untuk penanggulangan stunting yang dapat mengurangi masalah gizi buruk dan diharapkan dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih tinggi (dalam Haryono, Marlina 2021). Sehingga diperlukan penanganan yang segera dan berkelanjutan yaitu dengan melaksanakan kerjasama bersama seluruh elemen baik dari pemerintah, swasta sampai masyarakat dalam menurunkan angka stunting (dalam Sitohang & Lestari, 2024).

Sebagaimana implementasi kebijakan pastinya memerlukan kerjasama antar aktor dan organisasi untuk memastikan tujuan tercapai, sumber daya tersedia, dan konflik dikelola menurut (Campos & Reich, 2019) dalam Larasati & Raharj, 2024). Pada kasus stunting di Jawa Tengah yang bervariasi menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap penanggulangan stunting melalui peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah No. 43 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga dengan adanya dinas kesehatan yang bertanggungjawab membantu gubernur untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan, termasuk kebijakan, pelayanan, dan pencegahan penyakit (Pergub Jateng No.43, 2021 dalam Larasati & Raharjo 2024). Berikut merupakan data kasus stunting di provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2024 yang tersebar di 36 Kabupaten/Kota.

Tabel 1. Data Kasus Balita Stunting di Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Tegal	16.619
2	Banyumas	14.274
3	Brebes	11.978
4	Magelang	10.280
5	Banjarnegara	10.258

6	Klaten	8.350
7	Pemalang	8.070
8	Wonosobo	7.850
9	Kebumen	7.503
10	Purbalingga	7.332
11	Grobogan	6.728
12	Kendal	6.663
14	Boyolali	6.438
15	Temanggung	5.811
16	Purworejo	5.646
17	Pati	5.487
18	Sragen	5.439
19	Cilacap	5.303
20	Rembang	4.775
21	Wonogiri	4.447
22	Batang	4.246
23	Pekalongan	4.017
24	Sukoharjo	3.618
25	Jepara	2.887
26	Blora	2.824
27	Karanganyar	2.732
28	Kudus	2.373
29	Demak	2.130
30	Semarang	2.116
31	Kota Surakarta	1.522
32	Kota Pekalongan	1.290
33	Kota Semarang	1.206
34	Kota Tegal	1.015
35	Kota Salatiga	543
36	Kota Magelang	515

Sumber: Bappedalitbag Kab.Banyumas. Data Olah Penulis

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 10 Kabupaten dengan jumlah balita stunting terbanyak di Jawa Tengah, beberapa diantaranya di Kabupaten Tegal sebanyak 16.169, Kabupaten Banyumas 14.274, Kabupaten Brebes 11.978, Kabupaten Magelang 10.280, Kabupaten Banjarnegara 10.258, Kabupaten Klaten 8.350, Kabupaten Pemalang 8.070, Kabuapten Wonosobo 7.850, Kabupaten Kebumen 7.503, dan di Kabupaten Purbalingga 7.332. Sesuai dengan data balita stunting di Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2024 tersebut, Kabupaten Banyumas menduduki urutan ke-2 dari 10 Kabupaten dengan jumlah balita stunting terbanyak setelah Kabupaten Tegal. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka stunting di Kabupaten Banyumas masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten /Kota lain yang ada di Jawa Tengah.

Adapun regulasi yang dikeluarkan salah satunya berupa peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai Pencegahan dan Penanganan Stunting Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023. RAD stunting tersebut merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk menurunkan angka stunting dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2020-2023 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program kegiatan. Upaya tersebut dicanangkan untuk memastikan bahwa seluruh pihak baik pemerintah dan non pemerintah dapat berkontribusi dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Banyumas. Berikut adalah tabel data kasus balita stunting Per Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Tabel 2. Data Kasus Stunting Per Kecamatan di Kabupaten Banyumas

No.	Kecamatan	Balita		Jumlah	Presentase (%)
		Pendek	Sangat Pendek		
1.	Cilongok	261	1.288	1.549	20,48%
2.	Sumbang	211	669	880	13,81%
3.	Kembaran	103	617	720	16,98%
4.	Ajibarang	139	580	719	12,29%
5.	Jatilawang	107	585	692	19,30%
6.	Kebasen	94	589	683	16,54%
7.	Pekuncen	122	491	625	16,34%
8.	Kalibagor	121	478	599	17,47%
9.	Kedungbanteng	94	503	596	15,72%
10.	Sumpiuh	103	485	588	18,40%
11.	Sokaraja	109	466	575	10,98%
12.	Patikraja	79	478	557	15,54%
13.	Purwokerto Selatan	122	431	553	15,87%
14.	Tambak	89	448	537	18,68%
15.	Banyumas	72	463	535	17,13%
16.	Kemranjen	87	404	491	11,45%
17.	Baturaden	67	384	451	15,18%
18.	Wangon	92	337	429	9,21%
19.	Karanglewas	104	283	387	10,30%
20.	Gumelar	52	310	362	13,74%
21.	Rawalo	81	254	335	11,64%
22.	Lumbir	67	251	318	13,14%
23.	Purwojati	45	244	289	13,03%
24.	Purwokerto Timur	60	218	278	13,34%
25.	Purwokerto Barat	31	180	211	9,91%
26.	Purwokerto Utara	28	145	173	8,89%
27.	Somagede	32	110	142	7,04%

Sumber: Data Olah Penulis (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas)

Berdasarkan dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat total sebanyak 14.274 untuk jumlah balita yang mengalami stunting di Kabupaten Banyumas, yang tersebar di 27 Kecamatan. Jumlah tertinggi berada di Kecamatan Cilongkok yaitu diangka 1.549 anak, kemudian disusul oleh Sumbang sebanyak 880 anak, Kembaran 720 anak, Ajibarang 719 anak, Jatilawang 692 anak, Kebasen 683 anak, Pekuncen 625 anak, Kalibagor 599 anak, Kedungbanteng 596 anak, Sumpiuh 588 anak, Sokaraja 575 anak, Patikraja 557 anak, Purwokerto Selatan 553 anak, Tambak 537 anak, Banyumas 535 anak, Kemranjen 591 anak, Baturaden 451, Wangon 429 anak, Karanglewas 387 anak, Gumelar 362 anak, Rawalo 355 anak, Lumbir 318 anak, Purwojati 289 anak, Purwokerto Timur 287 anak, Purwokerto Barat 211 anak, Purwokerto Utara 173 anak, dan Kecamatan dengan jumlah stunting paling sedikit adalah kecamatan Somagede yaitu sebanyak 142 anak.

Diantara 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas tersebut, Kecamatan Karangewas merupakan salah satu Kecamatan yang melaksanakan kegiatan mini loka karya dengan topik pembahasan Penanganan Percepatan Penurunan Stunting yang dalam hal ini merupakan kegiatan lintas sektoral. Sebagaimana dalam mensukseskan kebijakan maka sangat membutuhkan koordinasi lintas sektoral guna keberhasilan pencapaian tujuan bersama (Syamsuadi et al. (2020) dalam Syamsuadi et al. (2023). Adapun peserta yang hadir bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPINCAM) yang

terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bappedalitbag, Kasi Permas Kecamatan Karanglewas, Ketua TP PKK Kecamatan, Faskes Pendamping RS. Hermina Purwokerto dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Karanglewas. Dari data kunjungan TPK, diketahui sasaran beresiko di Kecamatan Karanglewas terdiri dari 11 orang bayi dua tahun (Baduta) dan 131 orang ibu hamil (Bumil). Sehingga diharapkan adanya dukungan dan peran serta dari lintas sektoral (linsek) dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting yang ada di wilayah Kecamatan Karanglewas yang terdiri dari 13 Desa. Berikut data kasus balita stunting berdasarkan Desa di Karanglewas.

Tabel 3. Data kasus stunting berdasarkan Desa di Kecamatan Karanglewas Tahun 2024

No.	Nama Desa	Stunting	Presentase
1.	Babakan	46	14,1%
2.	Karanggude Kulon	43	11,8%
3.	Sunyalangu	43	12,5%
4.	Jipang	37	3,3%
5.	Singasari	33	14,5%
6.	Pangebatan	32	8,9%
7.	Pasir Lor	29	12,2%
8.	Pasir Kulon	26	11,8%
9.	Karangkemri	24	10,2%
10.	Tamansari	21	5,5%
11.	Pasir Wetan	20	9,9%
12.	Karanglewas Kidul	19	6,0%
13.	Kediri	14	5,3%

Sumber: Data Olah Penulis (Bappedalitbag Kab.Banyumas)

Berdasarkan tabel dari laporan hasil pengukuran kasus balita stunting diatas menunjukan bahwa di Kecamatan Karanglewas terdapat 13 Desa dengan angka stunting paling tinggi adalah di Desa Babakan yaitu sebanyak 46 anak, dan dengan jumlah terendah berada di Desa Kediri sebanyak 14 anak. Selain itu Desa Babakan juga menjadi wilayah Desa dengan presentase stunting tertinggi ke-1 di antara 13 Desa di Kecamatan Karanglewas tersebut.

Sesuai dengan masalah tersebut, tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan dalam penanggulangan stunting di Desa Babakan. Meskipun sejumlah regulasi dan kebijakan telah dicanangkan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, namun realitanya jumlah balita stunting di Desa Babakan masih menunjukan jumlah stunting paling tinggi di antara 13 Desa yang ada di Kecamatan Karanglewas. Permasalahan ini sudah tentu menambah urgensi bagi pemerintah untuk dapat memberikan perhatian khusus pada desa-desa lokus stunting, seperti Desa Babakan yang diharapkan untuk mampu meningkatkan aksi nyata dan memberikan terobosan yang tepat sebagai upaya untuk menekan angka stunting di Desa Babakan. Pemerintah bersama masyarakat sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam objek implementasi kebijakan stunting dan juga memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan stunting di wilayahnya sendiri. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif dan berkelanjutan di Desa Babakan.

Oleh karena itu, maka penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan. Sebagaimana pelaksanaan kebijakan adalah kelanjutan dari proses perumusan dan penerapan kebijakan dan juga sebagai upaya yang terfokus pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Harahap, (2020) dalam Syahrizal et al., 2023). Implementasi kebijakan

juga merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan yang diterapkan. Melalui beberapa dukungan kebijakan atau regulasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dan juga dasar hukum untuk acuan dalam bertindak dan sebagai aspek perlindungan yang kuat, baik bagi penyelenggaraan negara maupun bagi masyarakat. Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagaimana peneliti merencanakan, menjalankan, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian dengan proses melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian menjadi hasil yang disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Metode dan pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komperhensif dan relevan tentang permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti terkait implementasi kebijakan penanggulangan stunting dengan Lokasi penelitian di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

Adapun sasaran dalam penelitian ini yaitu pihak pihak yang memiliki peranan penting dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan meliputi; dari pihak Pemerintah Desa Babakan, Puskesmas, Kader Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bidan Desa, dan masyarakat Desa Babakan, dengan menggunakan teori menurut Edward III sebagai dasar analisis. Pengumpulan sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti secara langsung melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dengan cara tidak langsung, yaitu melalui perantara atau media lain seperti dari buku, jurnal, artikel, dan laporan lainnya yang berkaitan dengan dengan topik penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Peneliti memilih delapan (8) informan dengan pertimbangan mendalam mengenai situasi di lapangan dan pengalaman terkait implementasi kebijakan penangulangan stunting di Desa Babakan, diantaranya Sekertaris Desa Babakan, Bidan Desa, Ahli Gizi Puskesmas, Kader PKK, Kader Posyandu, dan tiga Ibu balita yang terindikasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui metode wawancara observasi, dan dikumentasi. Kemudian langkah analisis data menggunakan model dari Miles & Hubermen 1984 dalam Murdiyanto, (2020) yang dilakukan melalui serangkaian tahapan meliputi; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini di laksanakan di Desa Babakan, sebuah wilayah yang terletak di kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Desa Babakan menjadi lokasi penelitian karena termasuk dalam daftar desa dengan angka stunting tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 14,1% dan diangka 46 kasus stunting (Bappedalitbag Kab. Banyumas). Desa Babakan termasuk salah satu dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Karanglewas dengan luasnya sekitar 301,0 Ha dan tercakup dari 3 wilayah dusun yaitu Dusun I yang terdiri 3 RW dan 9 RT meliputi wilayah grumbul Babakan, Karanggandul dan Karangklesem, wilayah Dusun II terdiri dari 4 RW dan 12 RT yang meliputi grumbul Babakan lor, Kedawung, Takom dan Karangpucung, sedangkan wilayah Dusun III terdiri dari 4 RW dan 12 RT yang meliputi grumbul

Kalibamban, Pejaten, Jatisawit, dan Pengempon. Desa Babakan memiliki satu Puskesmas, sebuah Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) dan 8 Posyandu aktif yang tersebar di wilayah dusun.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis terkait implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2024. Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, yang meliputi dari implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi dan juga dipandang sebagai fenomena kompleks dari sebuah kebijakan, sekaligus menjadi variable terpenting terhadap keberhasilan kebijakan terkait isu-isu publik (Situmorang Chazi, (2016) dalam Permatasari, 2020). Implementasi kebijakan merupakan salah satu aktivitas utama dalam administrasi publik. Hal ini karena kebijakan merupakan dasar pelaksanaan yang telah direncanakan serta dirumuskan oleh unit administratif atau birokratik dalam berbagai tingkat pemerintahan agar mampu mencapai tujuan. Menurut Nugroho juga mendefinisikan implementasi sebagai usaha atau upaya dalam melaksanakan suatu keputusan kebijakan (Dwidjowijoto, 2006). Tahapan administrasi publik tentu akan melalui proses yang dinamakan kebijakan. Sebagaimana munculnya kebijakan publik disebabkan oleh adanya masalah atau suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya kebijakan publik yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan & memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Salah-satu permasalahan serius yang mejadi fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah Stunting yang merupakan masalah malnutrisi secara global yang sampai saat ini masih mendapatkan perhatian dunia (Wijayanti et al., 2024). Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, dan infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi badan anak berada dibawah dari standar yang ditetapkan. Kondisi ini dapat terjadi sejak anak dalam kandungan, dan dampaknya terlihat jelas setelah anak berusia 2 tahun. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang kurang dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO (Kemenkes RI, 2018). Oleh karena itu, untuk mengatasi stunting di Kabupaten Banyumas diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat medis, tetapi juga melibatkan faktor-faktor soaial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kesehatan anak-anak secara menyeluruh (Pulungan (2021) dalam Haris & Amri 2024).

Adapun kebijakan atau program penanggulangan stunting yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Desa Babakan diantaranya meliputi:

1. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) merupakan program yang bertujuan untuk memberikan asupan nutrisi tambahan kepada kelompok rentan, seperti bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (Leniwarti, 2021 dalam Bakrisuk & Hasibuan (2025). Dalam pelaksanaannya PMT yang diberikan di Desa Babakan meliputi beberapa jenis yang berbeda-beda sesuai pada kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Babakan. Salah satunya adalah PMT 56 hari yang diberikan kepada balita yang terindikasi kurang gizi atau stunting.

Adapun yang melaksanakan pengolahan PMT sekaligus mendistribusikan PMT ke sasaran adalah Kader Posyandu Desa Babakan, dengan sasaran balita yang terindikasi stunting. Selama 56 hari pelaksanaan, para balita menerima makanan tambahan bergizi yang disiapkan sesuai menu dan disesuaikan dengan kebutuhan gizi harian. Selain

memberikan makanan tambahan, juga disertai dengan edukasi, penyuluhan, konseling gizi dan kesehatan. Kegiatan PMT ini diharapkan dapat mendorong kemandirian pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan.

2. Kunjungan dari rumah ke rumah

Peran aktif para kader kesehatan dalam membantu masyarakat untuk melakukan deteksi dini, dan stimulasi tumbuh kembang pada balita dengan melaksanakan kerjasama bersama pihak puskesmas dan juga bidan desa terkait untuk melakukan pemeriksaan rutin di posyandu, yang merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat, dalam praktiknya di Desa Babakan program ini ditujukan kepada warga desa dengan sasaran ibu hamil, balita, anak-anak, dan lansia. Melalui data sasaran yang diperoleh tersebut. Sehingga dilakukan kunjungan dari rumah ke rumah oleh tim guna memastikan kondisi tumbuh kembang yang optimal, dengan pemeriksaan balita meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan lingkar kepala. Selain pemeriksaan fisik tim juga akan memberikan edukasi tentang pentingnya peran keluarga, dalam menjaga asupan gizi dan menerapkan pola hidup sehat.

Program tersebut bertujuan untuk memantau dan meningkatkan kesehatan masyarakat, serta menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang dikelola oleh kader kesehatan, sebagaimana peran penting kader posyandu sebagai ujung tombak dalam melayani kesehatan masyarakat di Desa Babakan. Kunjungan dari rumah ke rumah yang secara bergiliran oleh tim tersebut diharapkan dapat memberikan pendampingan dalam upaya edukasi dan upaya dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang upaya penanganan stunting (Yudha et al., 2024).

3. Program Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita

Penyuluhan berupa sosialisasi dan bimbingan kepada calon dan orangtua balita perlu dilakukan untuk memberikan informasi dan keterampilan tentang pola makan sehat yang beragam dan bergizi bagi ibu hamil dan balita (Frey et al., 2024). Tujuannya untuk merangsang perubahan perilaku masyarakat dalam memilih, memasak, dan mengonsumsi makanan yang bergizi serta menjalankan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

a. Kelas Ibu Hamil

Merupakan kelompok belajar bagi para calon ibu, untuk mendapat pengetahuan dan keterampilan dari perawatan bayi baru lahir, penyakit menular, serta kepengurusan akte kelahiran. Harapannya adalah agar ibu selamat dan tumbuh kembang calon buah hati optimal.

b. Kelas Ibu Balita

Merupakan kegiatan dengan sasaran ibu yang memiliki balita, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dalam mewujudkan tumbuh kembang balita yang optimal.

Berdasarkan dari beberapa kebijakan atau program yang dilaksanakan di Desa Babakan tersebut, tentu harus ada implementasi yang baik dalam mencapai suatu tujuan. Implementasi menjadi sebuah cara agar kebijakan direncanakan mampu mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagaimana keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam proses tersebut. Implementasi kebijakan akan lebih mudah dipahami dengan analisis menggunakan teori-teori tertentu, yang nantinya akan memberikan gambaran mengenai suatu objek, kondisi, hingga prosesnya. Sehingga dapat memudahkan untuk dapat menilai apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Karena implementasi sebagai sumber terlaksananya kebijakan, dimana implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak

variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut berhubungan satu sama lainnya. Menurut teori George Edward III dalam bukunya Solichin Wahab (Leki.,et.,al 2024) faktor atau indikator tersebut dipengaruhi oleh 4 variabel utama, yaitu sebagai berikut;

1. Komunikasi yang meliputi aspek transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi penyampaian program.
2. Sumber Daya meliputi ketersediaan SDM maupun material, yang meliputi Fasilitas sarana prasarana, dan Dana anggaran.
3. Disposisi meliputi komitmen pelaksana dan sikap perilaku pelaksana.
4. Struktur Birokrasi yang meliputi kejelasan SOP secara resmi, dan pembagian tugas pokok serta fungsi yang jelas dalam pelaksanaan program.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutikno & Naufal (2023) dengan judul “Proses Collaborative Governance Penanggulangan Stunting di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes”. Sesuai dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa proses kerjasama yang dilakukan antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan pihak swasta dalam bersinergi untuk menanggulangi angka stunting di lingkungan masyarakat, yang tertuju pada masing-masing pihak saling berperan dan bertanggungjawab satu sama lain. Selain itu proses collaborative governance tersebut juga mampu berjalan dengan prinsip dan nilai-nilai dalam proses kerjasama, sehingga secara bertahap pemerintah mampu mengurangi angka stunting dan mengembangkan model jaringan sosialisasi dan edukasi kesehatan meliputi pola makan dan pola asuh anak dalam upaya penanggulangan dan percepatan penurunan stunting sesuai koordinasi yang baik. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana dalam proses koordinasi implementasi penanggulangan stunting di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas telah tertuang dalam satu komitmen bersama yang dibentuk berdasarkan kebijakan bersama dengan bersinergi untuk menanggulangi penurunan angka stunting yang dihadapi oleh masyarakat, pemerintah daerah, sampai pemerintah pusat. Kedua penelitian sama-sama menunjukkan hasil yang baik, karena beberapa dari indikatornya telah tercapai dengan baik.

PEMBAHASAN

Fokus pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Fokus penelitian merupakan serangkaian masalah yang perlu dirumuskan sebagai inti pembahasan dalam topik penelitian agar penelitian memiliki arah yang jelas. Sehingga data yang dikumpulkan dan analisis dapat dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teori yang digunakan sebagai dasar analisis adalah menurut Edward III yang dipengaruhi oleh 4 aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi (communication) Kebijakan Penanggulangan Stunting

Komunikasi memegang peranan krusial sebagai salah-satu faktor tepat yang mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan publik, dalam hal ini bahwa komunikasi diperlukan untuk menyampaikan pesan kebijakan secara jelas, akurat, konsisten (Asmawati, 2020). Sehingga dapat meningkatkan kesuksesan pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Menurut teori model implementasi kebijakan dari Edward III (Subasono, 2005 dalam Siregar, (2022) bahwa komunikasi adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik terutama masyarakat sebagai sasaran program. Sebagaimana penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula (Pratama, et., al. 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam kebijakan program penanggulangan stunting di Desa Babakan

telah diterapkan dengan baik melalui tiga sub aspek utama, yang meliputi transmisi, kejelasan informasi yang di komunikasikan, dan konsistensi penyampaian komunikasi.

Sub aspek transmisi mengharuskan bahwa kebijakan publik disampaikan sesuai dengan tindakan yang diperlukan untuk implementasi yang efektif. Karena keputusan kebijakan dan perintah yang telah disepakati harus diteruskan kepada pihak yang tepat sebelum dapat diikuti (Setiono, et., al. 2024). Berdasarkan dari penelitian, transmisi komunikasi dalam penanggulangan stunting di Desa Babakan dilakukan dengan baik, melalui berbagai koordinasi, baik secara formal maupun informal. Secara formal, komunikasi disalurkan dengan melalui rapat rutin di balai desa, pertemuan kader posyandu, dan adanya sosialisasi atau penyuluhan edukasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, serta koordinasi dengan ahli gizi dan bidan desa bersama kader dalam mendukung program kelas ibu hamil dan kelas ibu balita. Secara informal komunikasi juga berjalan lewat grup whatsapp dan acara slepanan, bahkan juga dilakukan melalui kunjungan dari rumah ke rumah secara bergiliran kepada masyarakat oleh ahli gizi, dan bidan desa bersama kader.

Kemudian dalam Sub aspek kejelasan juga mengharuskan bahwa kebijakan yang ditransmisikan kepada pihak pelaksana dan pihak terkait harus dipahami dengan jelas (Setiono D., et., al. 2024). Petunjuk pelaksanaan harus jelas untuk memastikan bahwa pelaksana mengetahui apa yang perlu disiapkan agar hasilnya efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukan, bahwa Desa Babakan untuk tingkat kejelasan komunikasi terkait program penanggulangan stunting sudah dilakukan dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya media komunikasi yang bervariasi seperti dalam bentuk poster, jadwal kegiatan, dan grafik data yang jelas serta akurat. Dari sisi pelaksana program struktur dan peran juga sudah dianggap jelas meliputi dari pemerintah desa, pihak puskesmas, bidan desa bersama kader sebagai pelaksana utama, sementara masyarakat jelas sebagai sasaran program. Dan sosialisasi yang disampaikan juga disusun agar mudah dipahami dan dipastikan informasinya valid karena bersumber dari dinas kesehatan dan puskesmas. Selanjut nya bahwa bidan desa bersama kader juga rutin menyampaikan komunikasi melalui kegiatan bulanan seperti posyandu dan kelas ibu hamil bersama kelas ibu balita. Bahkan jika ada warga yang tidak hadir atau kesulitan akses informasi, kader posyandu aktif melakukan kunjungan rumah atau menghubungi tetangga sekitar untuk memastikan info tetap sampai ke warga tersebut. Metode ini memastikan agar tidak ada warga yang tertinggal dari penyampaian komunikasi penting mengenai program penanggulangan stunting di Desa Babakan.

Selain itu, sub aspek konsistensi juga diperlukan sebagai upaya untuk dapat memastikan bahwa pesan dan instruksi dari atasan selalu tersampaikan secara rutin dan tidak berubah-ubah. Agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dan sasaran program di lapangan (Jaleha & Suriyani, 2020). Berdasarkan dari penelitian di Desa Babakan, konsistensi dalam penyampaian komunikasi mengenai program penanggulangan stunting secara praktik telah berjalan dengan cukup baik, terutama dari pelaksanaan kegiatan seperti posyandu yang rutin dilakukan di tiap pos satu bulan sekali, serta adanya sosialisasi atau penyuluhan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita juga dilaksanakan secara berkala. Meskipun bidan desa tidak menetap 24 jam di Desa Babakan, namun bidan tetap berkomitmen untuk berusaha selalu hadir pada kegiatan posyandu yang dilaksanakan bergiliran di delapan (8) pos secara rutin. Sehingga konsistensi komunikasi mengenai stunting kepada masyarakat dapat terus tersalurkan dengan baik.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi dalam program penanggulangan stunting di Desa Babakan sudah berjalan secara baik.

Sebagaimana dinyatakan oleh Edward III (dalam Mudi, et.al., 2022) Oleh karena itu, penting bagi implementor untuk harus terus aktif bersosialisasi dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan dalam menyampaikan komunikasi terkait dari tujuan kebijakan, diharapkan masyarakat paham dengan baik tujuan dari kebijakan yang dibuat. Adapun bentuk dari dukungan masyarakat Desa Babakan terhadap kebijakan penanggulangan stunting adalah dengan mengikuti dan berpartisipasi melalui program yang telah dicanangkan. Karena dengan komunikasi yang baik antara pihak pelaksana dan sasaran program, diharapkan dapat mempermudah dan membantu dalam mencapai tujuan kebijakan. Hal ini tampak dengan terpenuhinya aspek komunikasi yang telah disampaikan oleh para pelaksana kepada masyarakat sebagai sasaran program, baik dari segi tranmisi, kejelasan, maupun konsistensi dari para pelaksana program yang memungkinkan pesan kebijakan penanggulangan stunting tersampaikan kepada masyarakat secara luas dan transparan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Kardinal, et al. (2024), yang menunjukkan bahwa komunikasi merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Mereka menekankan perlunya kejelasan, transparansi, serta konsistensi dalam penyampaian komunikasi agar koordinasi dan pelaksanaan program berjalan efektif di masyarakat. Selaras bahwa keberhasilan program penanggulangan stunting di Desa Babakan telah menerapkan strategi koordinasi agar pesan kebijakan benar-benar diterima dan juga dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana komunikasi disampaikan dengan data yang jelas dan akurat dari pihak puskesmas dan posyandu mengenai program dalam penanggulangan stunting di wilayah kerjanya. Puskesmas karanglewas juga berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan, edukasi dan rujukan, semenantara dari pihak posyandu yang juga menjadi wadah bagi masyarakat dalam mendapatkan komunikasi serta pelayanan secara berkala terkait stunting.

Sumber Daya (Resources) Pendukung Kebijakan Penanggulangan Stunting

Sumber daya merupakan indikator kedua setelah komunikasi yang akan turut mempengaruhi terhadap keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam mendukung terhadap berhasilnya kebijakan yang diimplementasikan (Kardinal, et.,al. 2024). Sumber daya (resources) yang dimaksud dalam implementasi kebijakan adalah pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumber daya sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Adapun sumber daya yang dibutuhkan meliputi kualitas dan kuantitas staff/SDM pelaksana, ketersediaan informasi yang memadai sesuai kewenangan yang diberikan kepada pelaksana, serta adanya fasilitas pendukung dalam hal melaksanakan kegiatan program seperti dana/anggaran dan sarana prasarana (Nurva & Maharani, 2023).

Sub aspek pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM) atau Staf dalam program penanggulangan stunting, SDM menjadi aktor utama dalam proses implementasi kebijakan, mereka penggerak dari sumber daya lainnya. Menurut Van Metter & Van Horn (Nugroho, 2024:628 dalam Setyawan, (2021), bahwa sumber daya yang paling terkait dari sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia. Sebagaimana staf pelaksana kebijakan publik harus tersedia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi memadai (Sustama, et.al., 2024). Sesuai hasil penelitian bahwa tenaga pelaksana dalam program penanggulangan stunting di Desa Babakan, meliputi dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Banyumas, Puskesmas Karanglewas, Bidan desa bersama Kader posyandu, dan didukung oleh Pemerintah desa serta masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan program. Puskesmas di karanglewas, menjadi pusat pendidikan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak serta

pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat desa untuk mendukung upaya penanggulangan stunting. Selain itu ahli gizi dari puskesmas telah memiliki keahlian pendidikan dan pengalaman yang relevan dalam mendukung pelaksanaan tugas secara profesional. Ketersediaan kader posyandu yang didampingi bidan desa juga telah dibekali pengalaman dan arahan langsung dari ahli gizi puskesmas dan dinas terkait, sehingga memiliki peran yang memadai. Namun ketersediaan bidan desa di babakan dalam tugas dan pelayanannya tidak 24 jam. Karena bukan bidan tetap dan bukan domisili Desa Babakan. Sehingga menjadi tantangan, jika ada yang membutuhkan pertolongan darurat, maka dari masyarakat bisa langsung ke Puskesmas, Klinik atau RS terdekat. Alasannya karena tidak ada bidan desa yang stand by untuk malam hari, tapi pelayanannya hanya untuk pagi sampai sore hari pukul 16.00 di PKD, itupun jika tidak ada tugas keliling di Posyandu Babakan.

Oleh karena itu perlu adanya kolaborasi yang erat antara ahli gizi, bidan desa, dan kader posyandu untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program sudah dianggap memadai dari kesesuaian keahlian, keterampilan, dan juga kompetensi. Meskipun tidak tersedianya bidan desa yang menetap 24 jam di Babakan. Maka perlu ditegaskan bahwa adanya kolaborasi tersebut dapat menjadi pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Herni, et.al., 2024) bahwa praktik kolaborasi sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai tantangan, peluang, dan sumber daya yang tersedia di Desa Babakan, dengan proses yang jelas tentang konteks terkait, sehingga para pemangku kepentingan dapat merencanakan kebijakan dengan lebih efektif, merencanakan strategi yang sesuai, dan menetapkan tujuan yang realistis untuk kolaborasi mereka (Hardi, 2020). Selain itu para pemangku kepentingan juga bisa menunjukkan transparansi, konsistensi, serta juga komitmen untuk bekerjasama (Islamy, 2021 dalam Herni et.,al.(2024).

Kemudian sub aspek sumber informasi yang mudah dipahami dari pelaksana dan sasaran program. Selain dari SDM, aspek sumber daya informasi juga merupakan komponen yang penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan. Informasi yang dimaksud mencakup 2 jenis informasi, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dan informasi mengenai data akurat dan kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan (Sustama, et.al.,2024). Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelaksana program memperoleh sumber informasi dari berbagai level kelembagaan, khususnya Puskesmas sebagai pusat koordinasi bidang kesehatan, termasuk juga arahan langsung dari pemerintah desa, bidan dan ahli gizi. Dimana ahli gizi sendiri juga memperoleh informasi dari dinas kesehatan. Contoh penerapan sumber informasi ini adalah melalui sosialisasi gizi dan edukasi pola hidup sehat yang dilakukan dalam ibu hamil, dan kelas ibu balita untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap isu stunting. Kemudian koordinasi dari pemerintah desa juga dilakukan dengan upaya mendukung, melalui edukasi, mulai dari calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu menyusui dan ibu balita, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lingkungannya. Upaya penyebaran informasi ini bertujuan dalam upaya mengubah pola pikir masyarakat agar semakin sadar dari pentingnya gizi dan pola asuh yang tepat, mengingat kasus stunting juga ditemukan pada keluarga dengan ekonomi mampu akibat pola asuh yang kurang tepat.

Sebagaimana pola pengasuhan secara tidak langsung akan mempengaruhi status gizi anak (Christiana,et.al,2022). Pengasuhan diwujudkan dalam beberapa aktivitas yang

biasanya dilakukan oleh orang tua seperti praktik pemberian makan, sanitasi, dan perawatan kesehatan lainnya, yang akan memiliki dampak besar bagi kesehatan anak dimasa mendatang. Namun kenyataannya di Babakan menunjukkan bahwa yang mengalami stunting itu tidak hanya dari keluarga terbelakang/ kurang mampu, meskipun kemiskinan dan kurang gizi menjadi faktor resiko utama, ternyata stunting juga dapat terjadi pada keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Faktor tersebut meliputi pola asuh yang kurang tepat, yang dapat mempengaruhi masalah pada tumbuh kembang anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Babakan, diketahui bahwa mereka (Pemerintah Desa) merasakan beban yang menjadi berat, terutama dalam upaya berusaha merubah pola pikir (mindset) masyarakat untuk mendukung upaya penanggulangan stunting. Tantangan terbesar bukan hanya soal ekonomi, tapi juga dalam membangun kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang tepat, terutama pada keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu namun juga kurang dalam memperhatikan asupan nutrisi anak akibat kesibukan orang tua yang bekerja misalnya dan kecenderungan memberi makanan instan seperti sosis atau nugget yang kadang-kadang belum tentu sehatnya. Meskipun tidak selalu menjadi penyebab utama, makanan instan seringkali kurang nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan optimal anak, dan bisa berkontribusi menjadi masalah stunting (Imani, 2020). Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa secara aktif melakukan edukasi melalui program kelas ibu hamil dan kelas ibu balita, serta penyuluhan langsung tentang pentingnya gizi dan pola makan sehat bagi tiap balita. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, membuat orang tua lebih peduli dengan asupan makan anak, dan mampu mendeteksi dini masalah gizi agar risiko stunting pada balita bisa ditekan semaksimal mungkin.

Selanjutnya Sumber Daya Fasilitas berupa anggaran/ insentif yang diberikan sebagai penunjang dalam program penanggulangan stunting. Faktor lain untuk menunjang terwujudnya penanggulangan stunting dengan baik adalah dengan adanya fasilitas pendukung. Sebagaimana fasilitas berupa sarana prasarana yang dibutuhkan dan harus ada untuk terwujudnya implementasi suatu kebijakan publik (Wahsyati, et.al., 2025). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait ketersediaan sarana prasarana penunjang pelaksanaan program penanggulangan stunting di Desa Babakan, untuk fasilitas yang tersedia meliputi bangunan fisik seperti gedung Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) yang menjadi pendukung dalam pelayanan kesehatan di Desa Babakan, serta peralatan kesehatan seperti alat ukur, alat timbangan, dan antropometri yang digunakan untuk mendeteksi balita yang terindikasi. Selain itu, hasil wawancara dan observasi penelitian bahwa terdapat 8 posyandu yang tersebar di wilayah Desa Babakan, masing-masing didukung oleh 8 kader posyandu dengan fasilitas alat timbangan dan pengukuran yang memadai. Semua sarana prasarana ini dianggap sudah cukup dalam mendukung pelaksanaan program secara efektif.

Pelaksanaan program penanggulangan stunting juga didukung oleh anggaran dana desa yang dialokasikan Pemerintah Desa (Pemdes). Anggaran dana desa sangat mendukung pelaksanaan program penanggulangan stunting di desa babakan. Menurut sekertaris Desa, bahwa anggaran ini digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, pelatihan kader, dan fasilitas pendukung posyandu. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk bantuan jambanisasi dan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Hal tersebut karena program penanggulangan stunting sudah menjadi prioritas desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 95.080.000 untuk anggaran program stunting, dan sebesar Rp. 218.250.000 untuk bantuan RTLH termasuk jambanisasi yang tergabung dalam anggran pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun 2025. Anggaran tersebut telah digunakan

sebagaimana mestinya sesuai porsinya sehingga mampu mendukung keberhasilan program penanggulangan stunting di Desa Babakan.

Sehingga dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa aspek sumberdaya dalam mendukung kebijakan penanggulangan stunting sudah dilaksanakan dengan baik kepada para pelaksana dan masyarakat sebagai sasaran program. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa untuk ketersediaan sumber daya manusia atau yang biasa disebut staf dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan sudah cukup baik, yang terdiri dari beberapa unsur, mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Pihak Puskesmas Karanglewas, Pemerintah Desa Babakan, Bidan Desa bersama Kader Posyandu sampai ketingkat masyarakat sebagai sasaran program. Sumber informasi yang juga sudah disampaikan dengan baik dengan upaya untuk mudah dipahami. Serta fasilitas berupa anggaran dana dan insentif yang mendukung turut mewadai dalam menunjang keberhasilan secara keseluruhan.

Sikap Pelaksana (Disposition) Kebijakan Program Penanggulangan Stunting

Disposisi atau sikap dan pandangan pelaksana dalam kebijakan ini menentukan kelancaran implementasi. Sikap dan pandangan para pelaksana yang mendukung maupun menolak, akan tercermin dari bagaimana mereka melaksanakan tugas-tugasnya. Pelaksana yang mendukung akan menjalankan tugasnya dengan baik, dan juga sebaliknya (Setyawan & Srihardjono, 2021). Variabel disposisi terdiri dari dua aspek yaitu pengangkatan Birokrat dan adanya wewenang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sikap para pelaksana dalam implemenasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan sudah sangat baik. Terbukti dengan Pelaksana kebijakan dalam penanggulangan stunting di Desa menunjukan sikap yang bervariasi, diantaranya komitmen tinggi dari Pemdes mengusahakan keseriusan dan komitmen yang kuat terhadap penanganan stunting, termasuk pengalokasian sumber daya, waktu, dan juga tenaga yang cukup. Keterlibatan aktif dari pelaksana program di yang secara langsung dalam program lapangan seperti; penyuluhan, edukasi kelas ibu hamil dan kelas ibu balita, untuk pemantauan dan pendampingan keluarga dalam memastikan pelayanan yang efektif.

Kemudian pelyanan sikap dan komunikasi yang baik, yaitu pelaksana program turun secara langsung untuk melibatkan mereka dalam proses menyampaikan informasi mengenai pentingnya gizi anak secara jelas dan meyakinkan. Namun fakta di lapangan juga menunjukan bahwa masih terdapat kendala terkait program penanggulangan stunting yaitu ada beberapa masyarakat yang tidak mau mengakui bahwa anaknya stunting, sehingga kurang respon oleh beberapa sasaran untuk berperan aktif dalam kegiatan program. Alasannya dari beberapa keluarga yang tidak mengkaui anaknya stunting, karena pihak keluarga sudah yakin dengan diberikan makanan berupa biskuit, susu UHT, sosis, nugget, dan makanan isntan lainnya. Namun ternyata itu merupakan asumsi yang kurang tepat mengenai nutrsi yang dibutuhkan anak-anak. Sebagaimana menurut penelitian menurut (Yuwanti, et.al.,2021) bahwa kebiasaan makan makanan instan berhubungan dengan kejadian stunting pada balita, karena makanan instan merupakan makanan yang mudah diolah, namun demikian makanan instan mengandung tinggi kalori, kadar gula, lemak, dan garam tinggi, yang apabila dikonsumsi dalam kurun waktu lama akan meningkatkan berat badan anak yang mengarah kepada obesitas anak, yang mengakibatkan pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia, yang menjadi salah satu indikator terindikasi stunting. Maka diperlukan kesadaran masyarakat khususnya orang tua atau ibu balita yang bekerja dalam memberikan pola asuh untuk lebih melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak balitanya.

Sub aspek kewenangan formal yang diberikan kepada pelaksana program juga merupakan aspek penting dalam mendukung terlaksananya implemantasi kebijakan sesuai dengan otoritas dan kemampuan pelaksana dalam menjalankan tugasnya (Makmur S. et.,al 2023). Hasil wawancara menunjukan bahwa, kewenangan pelaksana program penanggulangan stunting di Desa Babakan telah sesuai dengan peran dan tanggungjawab masing-masing, dengan cakupan tugas yang jelas juga. Pemerintah Desa memiliki kewenangan melalui dukungan kegiatan yang dilakukan meliputi penyediaan anggaran dan juga sarana prasarana, serta penyediaan PMT pasti dari Pemdes mendukung. Kewenangan ini menunjukan bahwa otoritas pemdes dalam mendukung program sudah terlaksana dengan baik. Kader posyandu bersama bidan desa sebagai pelaksana yang secara turun langsung, juga memiliki kewenangan dalam menjalankan berbagai tugas dan perannya, seperti penimbangan BB, pengukuran TB, dan pengolahan menu makanan untuk PMT yang ditentukan. Kemudian ahli gizi juga memiliki cakupan kewenangan yang luas, ahli gizi bersama bidan bertanggungjawab dalam rekapan dan laopran data, pemantauan, pemberian edukasi kepada sasaran program.

Kesadaran dan kepatuhan Masyarakat sebagai sasaran program menunjukan bahwa kewenangan yang diberikan oleh pihak pelaksana telah dijalankan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa keluarga yang enggan mengkaui bahwa anaknya stunting, itu karena beberapa alasan, termasuk anggapan negatif tentang stunting atau pandangan yang kurang tepat mengenai pertumbuhan anak, dengan anggapan tinggi bada anak yang kurang sebagai suatu hal yang normal. Sehingga diperlukan koordinasi dari Pemerintah Desa, Kader Posyandu, Bidan Desa, dan Ahli gizi untuk menjalankan peran dan kewenagannya masing-masing dengan sinnergi yang baik. Pengelolaan kewenangan yang tepat juga berkontribusi terhadap keberhasilan dari program penanggulangan stunting di wilayah tersebut. Karena jika kebijakan ini dilaksanakan dengan efektif, pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus memiliki hasrat untuk melaksanakannya (Utami, 2022 dalam Makmur S. 2023).

Struktur Birokrasi dalam Program Penanggulangan Stunting

Menurut George C. Edward III, dalam (Pratama, et., al. 2024) bahwa yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber daya yang melaksanakan suatu kebijakan tersedia, serta para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakannya, jika struktur birokrasi terdapat kelemahan, maka kebijakan tidak dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik. Sebagaimana struktur birokrasi dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan, sebagaimana dalam mengkoordinasikan kebijakan yang telah direncanakan (Fahzira, 2021) bahwa terdapat dua aspek yang dapat mempengaruhi variabel struktur birkrasi yaitu, fargmentasi (pembagian tugas dan tanggungjawab) dan Standard Operating Prosedure (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman bagi implementor dalam bertindak.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan dalam tugas dan tanggungjawab sudah sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan keseluruhan program juga mengikuti arahan atau SOP. Sesuai analisis implementasi kebijakan, bahwa struktur birokrasi memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, dipantau, dan dievaluasi. (Syahril & Radjabessy 2023). Struktur birokrasi yang efektif dan efisien juga dapat memfasilitasi koordinasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kemudian struktur birokrasi yang

jelas dan terorganisir dengan baik, juga memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang tepat dan responsif terhadap perubahan atau tantangan yang muncul selama proses implementasi (Marienda & Rachmawati 2024)

Sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan stunting desa babakan telah berpedoman pada SOP yang berlaku. Pemerintah desa menyatakan bahwa untuk SOP yang digunakan itu berasal dari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Puskesmas dan atasan. Bidan desa bersama kader juga menyampaikan bahwa dalam menjalankan kegiatannya berdasar SOP dari Puskesmas, termasuk dalam melakukan edukasi serta pendampingan pada kader. Selain itu ahli gizi juga menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas mereka diatur secara teknis, sesuai dalam pembagian wilayah kerja di puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa SOP telah digunakan secara aktif dalam teknis pelaksanaan. SOP menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, untuk memastikan kegiatan berjalan teratur, efektif sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan anak yang resiko terindikasi stunting. Kemudian dalam masyarakat, SOP dengan bentuk tertulis memang tidak tersedia secara langsung. Namun dapat diperoleh juga melalui sosialisasi yang disampaikan oleh kader dan bidan desa yang secara rutin, dengan Bahasa sederhana dan mudah dipahami. Sehingga masyarakat memahami dengan jelas apa yang diharapkan dan bagaimana program dilaksanakan.

Adanya kejelasan dalam pembagian tanggungjawab dan tugas dari setiap pelaksana juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan seperti pandangan Edward III (dalam Mudi, et.al., 2022) bahwa struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan harus paham dengan tanggungjawab dan kewenangan dalam implementasi kebijakan yang disesuaikan dengan SOP yang jelas yang menjadi acuan dalam setiap kegiatan. Sedangkan pemerintah Desa Babakan juga mengikuti arahan dari atas terbukti dengan adanya pemberian makanan, dan dilakukannya sosialisasi terkait stunting yang berjalan rutin setiap kegiatan kelas balitan dan kelas ibu hamil. Sebagaimana yang dikemukakan Edward III (dalam Mudi, et.al., 2022) bahwa fungsi adanya SOP yaitu sebagai pedoman bagi setiap implementator dalam melakukan tindakan yang sesuai arah dan sasaran. Sebagaimana dalam kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, karena jika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka, yang akan menyebabkan menghambat jalannya kebijakan. Karena struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka kesimpulan dari implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas menunjukan bahwa, belum sepenuhnya proses implementasi berjalan secara optimal. Sebagaimana sesuai teori Edward III yang meliputi 4 aspek. Masih terdapat 1 aspek yaitu sumber daya terutama sumber daya manusia (SDM) masih kurang, karena bidan tidak menetap 24 jam di desa, sehingga pelayanan kurang optimal. Selain itu, sasaran yang tidak mengakui anaknya stunting, meski ekonomi tergolong mampu, dinyatakan karena faktor pola asuh dan kebiasaan yang kurang tepat. Sedangkan 3 aspek yang sudah berjalan optimal yaitu terbukti dengan komunikasi yang terjalin efektif, ketersediaan sumber daya memadai, disposisi pelaksana yang mendukung, dan struktur birokrasi sesuai tugas porsinya.

1. Pada aspek komunikasi, meliputi sub aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam penyampaian informasi antar pihak pelaksana dan juga sasaran program secara hasil pembahasan menunjukkan bahwa sudah berjalan secara baik. Mulai dari transmisi dalam penyampaian informasinya, melalui koordinasi bersama pihak Pemerintah desa, pihak puskesmas, dan bidan desa dalam penanggulangan stunting secara langsung ada sosialisasi dan penyuluhan, serta media lainnya dari media sosial seperti grup whatsapp dan aplikasi si-gizi, yang memungkinkan pesan kebijakan tersampaikan kepada masyarakat secara luas dan mudah diakses secara umum. Terutama dari segi kejelasan dan konsistensi bahwa pesan sudah disampaikan secara rutin dan jelas oleh bidan desa bersama kader, yang juga didampingi pihak puskesmas, dan pemerintah desa juga mendukung pelaksanaan program penanggulangan stunting di Desa Babakan.
2. Aspek Sumber Daya secara keseluruhan juga menunjukkan bahwa sumber daya informasi yang mencakup data dianggap akurat, dengan adanya fasilitas serta sumber anggaran yang juga memadai. Selain itu kolaborasi seperti adanya tenaga gizi di puskesmas, bidan desa di Pusat Kesehatan Desa (PKD), dan didukung oleh kader posyandu di lapangan. Menjadikan kolaborasi dengan keterkaitan yang efektif. Meskipun ketersediaan SDM secara jumlah telah mencukupi, masih terdapat kendala dalam layanan bidan yang tidak bisa menetap 24 jam di desa, yang menjadikan pelayanan kurang optimal.
3. Pada aspek Disposisi dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting di Desa Babakan menunjukkan bahwa pelaksana sudah bekerja dengan baik dan juga memiliki komitmen serta kewenangan yang jelas. Namun terdapat tantangan dari respon masyarakat yang menjadi sasaran program, dimana terdapat beberapa masyarakat yang belum mau mengakui bahwa anaknya terindikasi stunting. Hal ini sering terjadi meski kondisi keluarga cukup baik, karena faktor pola asuh dan kebiasaan makan yang kurang tepat. Sehingga memerlukan solusi khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih terbuka dan mendukung program
4. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting di desa babakan juga menunjukkan bahwa untuk struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Sebagaimana adanya pedoman kerja secara resmi (SOP) yang sudah jelas menjadi arahan bagi semua pelaksana program. Pada sub aspek fragmentasi yaitu pembagian tugas dan tanggungjawab juga sudah terorganisir dengan baik yang diharapkan mampu mengarahkan dengan baik sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing. Dalam mendukung koordinasi yang efektif dan pelaksanaan program yang lancar.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan. Maka diperlukan rekomendasi sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang ada, harapannya agar dapat memberikan dampak positif secara berkelanjutan. Berikut beberapa saran yang dapat peneliti rekomendasikan:

1. Penguatan Komunikasi

Perlu dikembangkan mekanisme komunikasi yang lebih sistematis dan merata agar seluruh pelaksana dan sasaran program mendapat informasi teknis secara lengkap dan mudah dipahami. Seperti penggunaan media komunikasi digital, misalnya sudah tersedia grup WhatsApp maka perlu ditambahkan akun YouTube atau Instagram sebagai media edukasi efektif. Berisi tutorial atau video langkah-langkah gizi seimbang, cara memasak makanan bergizi, serta tips perawatan anak supaya mudah dipraktikkan langsung di rumah. Selain itu selalu adakan pertemuan koordinasi secara berkala agar seluruh

pelaksana dan sasaran program selalu update.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Perlu ditingkatkan kapasitas tenaga Kesehatan. Seperti sumber daya manusia (SDM), diharapkan Pemerintah Desa Babakan menyediakan SDM dalam hal ini tenaga Kesehatan khususnya bidan desa yang menetap 24 jam di Desa untuk di tempatkan di PKD. Selain itu bagi tenaga Kesehatan lainnya seperti kader kesehatan perlu diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan khususnya penanganan stunting, untuk efektivitas dalam menjalankan tugasnya.

3. Penyampaian Informasi Secara Jelas dan Menyeluruh

Bahwa penyampaian sosialisasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan, harus dilakukan secara menyeluruh dan jelas. Agar masyarakat lebih mudah untuk diajak berpartisipasi. Cara efektifnya melalui media yang mudah diakses atau diskusi langsung agar pesan tersampaikan dengan baik dan mengajak keterlibatan aktif warga sebagai sasaran program.

4. Evaluasi Berkala dalam Struktur Birokrasi

Bahwa koordinasi antar instansi yang terlibat harus lebih ditingkatkan supaya pelaksanaan program berjalan secara selaras. Serta regulasi terkait mekanisme pelaksanaan perlu dipertegas agar tugas dan tanggungjawab jelas. Sehingga harapannya untuk memeberikan dampak positif secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makasar. Syakir Media Press.
- Alhasni A. R., Herawati Mamonto, F., & Melisa Onibala, N. (2024). Buku Ajar Kebijakan Publik. Penerbit Tahta Media.
- Doli, T. M. R. P., & Piki Darma K. P. (2021). Administrasi Pulik. Eureka Media Aksara, 225/JTE/2021.
- Imani Nurul (2020). Stunting pada anak: kenali dan cegah sejak dini. Hijaz Pustaka Mandiri.
- Kementrian Kesehatan RI. (2021). Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021.
- Patimah S. (2021). Stunting Mengancam Human Capital. CV Budi Utama
- Subarsono. (2025). Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Belajar
- Winarno, Prof. Drs.Budi, MA., Ph D. (2016). Kebijakan Publik. Era Globalisasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Zahari A, F, M., Sagena U., Mustanir A., Amane A, P, O., dkk. (2023). Reformasi Administrasi Publik. Perkembangan Administrasi Publik. Edited by Yanto, A. Padang: Global Ekseklusif Teknologi.

Jurnal & Artikel

- Anggreni S., Muthmainah M., Septian N., Suganda T. (2024). Strategi Intervensi Penanganan Stunting di Indonesia: Studi Literatur. Sehati Jurnal Kesehatan. Vol.4, Nomor(1). Page 15-36. DOI: <https://doi.org/10.52364/sehati.v4i1.46>.
- Aprilia F., Fajar A. N., Rahmiwati A. (2024). Efektivitas Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal Terhadap Status Gizi Balita Stunting: Systematic Review. Media Informasi. Vol.20, No.(2). Page 25-34.
- Asmawati, Andi. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kelurahan Baranti Kabupaten Sidereng Rappang. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 8(1). Page 8–17.
- Azizah E. N., & Wardhani R. K. (2020). Gerakan Kader Posyandu Sadar Stunting di Desa Ringinpitu Kecamatan Plemahan. Journal of Community Engagement in Health. Vol.3(2). Page 229–232. <https://doi.org/10.30994/jceh.v3i2.70>.
- Bakrisuk S. F., & Hasibuan R. (2025). Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan

- (PMT) Terhadap Pertumbuhan Anak Usia 4-6 Tahun 2025. *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal*, 2(01), Page 50-56.
- Christiana I., Nazmi A. N., Anisa F. H. (2022). Hubungan Pola Asuh Ibu dengan Kejadian Stunting pada Balita di Desa Kertosari Wilayah Kerja Puskesmas Kertosari Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal Nursing)* 8(2). Page 398-409. DOI: <https://doi.org/10.33023/jikep.v8i2.1161>
- Dela, R. S. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.
- EI Supriyadi. (2021). Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal Rasi*, 3 (1).
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *JMIAP (Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik)*. Vol 3 (1), 11-21.
- Frety E. E., Ningrum A. G., Prasetyo B., Izzati D. (2024). Optimalisasi Kelas Ibu Hamil Dan Pelatihan Kader Posyandu Ibu Balita Sebagai Upaya Pencegahan Stunting. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*. Vol. 1(12), 3644-3649. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v1i12.761>.
- Gusdiva, Koeswara, & R. Putera. (2024). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok. (Gema Publica). Vol.9, No (1). Page 32-49. DOI: <https://doi.org/10.14710/gp.9.1.2024.32-49>.
- Hadi N. I. (2023). Challenges and Opportunities of Collaborative Governance in Addressing Stunting: Lessons from Papua. *KnE Social Sciences*. DOI: <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14183>
- Haris A. & Amri M. (2024). Peran Zakat dalam Mengatasi Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten Brebes. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol.6(1), 1-30. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v6i1.10706>
- Haryono D., & Marlina L. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Stunting di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *DPP. The Indonesian Journal of Politics and Policy*. Vol 3(2), 42-52.
- Herizal H., Muhrijal M., & Wance M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Journal of Governance and Social Policy*. Vol 1(1). 24-34.
- Herni H., Tahir N., Arfah S. R. (2024). Collaborative Governance: Membangun Solusi Bersama Dalam Penanggulangan Stunting. *Kolaborasi; Jurnal Administrasi Publik*. Volume 10(1). Page 58-74. DOI: <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i1.14456>
- Ibad D. A. & Megawati S. (2024). Program Keluarga Berencana: Studi Implementatif Terhadap Pendekatan Komunikasi Publik" Edward III" di Kota Kediri. *Publika*. Vol. 12, No. (3), 871-878.
- Kardinal, Hartawan, & Chaeriah S. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*. Vol. 2(2). Page 205-218. DOI: <https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.790>
- Kiranasari F., Tohari A., & Aisyah S. (2023). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol 6 No.(2), 1216-1227. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4948>
- Larasati K., & Budi Raharjo B. (2024). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah (Pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021). *Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*. 2(3). Page 212-219. DOI: <https://doi.org/10.55606/detector.v2i3.4173>.
- Latifa Suhada Nisa. (2020). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan* Vol.13(2), page173-79.
- Leki D F., Hardianto W. T., & Suprojo A. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Upaya Penanganan Stunting (Studi Kasus Di Kecamatan Lasialat, Kabupaten Belu). *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3). Page 92-100.
- Mahdi A., & Murjani. (2024). Implementasi Aplikasi Electronic Office (E-Office) Dilihat Dari

- Aspek Sumber Daya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 7(1). Page 796-805.
- Makmur S. (2023). Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya Disposisi dan melalui Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 1(3), 172-176.
- Marienda N. I., & Rachmawati I. (2024). Implementasi Program Penurunan stunting di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 1039-1047. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14584931>
- Mudi D. S., Turniantoro, & Erowati D. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam Penurunan dan Penanggulangan Stunting di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun 2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4). Page 105-117.
- Natalia Angga. (2022). Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). *Jurnal Tapis*. Vol.17(1). Page 15-26.
- Nursyifa & Halim. (2025). Stunting dan Ketimpangan; Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Sambas. *Ekodesitasi; Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata*. Vol.3 No. (1). Page 8-16. DOI: <https://doi.org/10.59996/ekodestinasiv3i1.144>.
- Nurva L. & Chatila M. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes. (*Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*) JKKI, Vol.12, No.02. Page 74-83.
- Parida G. & Heriyanto. (2025). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Desa Neglasari. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2). DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i2.26079>
- Permatasari A, I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *The journalish: Social And Government*. Vol.1, no (1). Page 33-37.
- Pratama M. R. W., Nurcahyanto H., & Kismartini K. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 274-298. DOI: <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i3.44927>
- Putri, E, N., & Nurcahyanto Herbasuki. (2021). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol 10 (2).
- Rafi Maulana H., & Ria Angin. (2024). Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan Di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 4(6). Page 61–70.
- Rahmadani S. & Lubis S. (2023). Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*. Vol. 9(1), 188–194
- Rachmawati D., Sudiarti T., & Fitri Y.P. (2023). Analisis Hasil Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal di Pos Gizi pada Balita Underweight di Kota Tangerang 2023. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(11). Page 2279-2287. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i11.418>.
- Saputra A.S., Suryoto S., & Sutikno C. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 162–170. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.8335>.
- Setyawan D. & Srihardjono N. B. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Reformasi*. Vol. 6(2), page 125-133. DOI: <https://doi.org/10.33366/rfr.v6i2.689>.
- Siregar Nurmayana. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menaganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*. Vol.1, no (7), Page 713-722.
- Sitohang & Lestari. (2024). Analisis Normatif Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

- Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah. Vol.1 nomor (12), halaman 848-856. DOI <https://doi.org/10.62335/40zgbt10>.
- Sutikno C. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. *Public Policy & Management Iquary (PPMI)*. Vol.6(1). Page 683-693 DOI: <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2022.6.2.8173>.
- Sutikno C., & Naufal A. (2023). Proses Collaborative Governance Penanggulangan Stunting di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 12(4), 101-111. <https://doi.org/10.33005/jdg.v12i4.3840>
- Sutikno C., & Yusuf M. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. (Sawala) *Jurnal Administrasi Negara*. Vol.11(1). Page 81-96. DOI: <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6342>.
- Sutikno C., Permana P. I. A., Atika Z. R., Amanda A. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. *Musamus Journal Of Public Admiistration*. Vol. 5(2). Page 268-280.
- Sutmasa & Yanu G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawarti*. 4(01). Page 25-36.
- Syahrizal H., & Jailani M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*. Volume1(1), Page 13–23. DOI: <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Syamsuadi A., Febriani A., Ermayani, Bunyamin B., Nursyiamah. (2023). Peran Lintas Sektor dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Dinamika Pemerintahan (JDP)*. Vol.6, No 1. Page 1-30.
- Syarli R. & Gusman P. (2022). Peningkatan Pemahaman Ibu Muda Tentang Pentingnya Asi dan MP ASI yang Tepat dalam Mencegah Stunting di Klinik Banjaran Medika di Banjaran. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol.4(5), page 1183–1190.
- Wahsyati A., Rostyaningsih D., & Warsono H. (2025). Efektivitas Program Cengkraman Mata Elang dalam Mencegah Kasus Stunting di Kabupaten Demak. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3). Page 965-984. DOI: <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i3.45561>.
- Wardani A. A., Rostyaningsih D., & Marom A. (2023). Implementasi Program Pencegahan Stunting di Puskesmas Kedung I Kabupaten Jepara. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 12(4). Page 283-302.
- Wijayanti, Gunarmi, Hastuti W. (2024). Program Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*. 15 (2). Page 298-312. DOI: <https://doi.org/10.26751/jikk.v15i2.2480>.
- Wijayanti, Gurnami, Hastuti. (2024). Program Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Surakarta. (*Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*). Volume (15), nomor 2. Halaman 298-312. DOI: <https://doi.org/10.26751/jikk.v15i2.2480>.
- Yudha E. P., Fadlunnisa D., Rahmadinna S., Ramadhaningsih, N. Aulia, S. Dina R. A. (2024). Pendampingan dan Penyuluhan Kegiatan Posyandu di Wilayah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Jawa Barat. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 4(1),39–48. <https://doi.org/10.55506/arch.v4i1.119>.
- Yuwanti Y., Mulyaningrum, F. M., & Susanti, M. M. (2021). Faktor–faktor yang Mempengaruhi Stunting pada balita di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 10(1). Page 74-84. DOI: <https://doi.org/10.31596/jcu.v10i1.704>

Peraturan Perundang Undangan

- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.